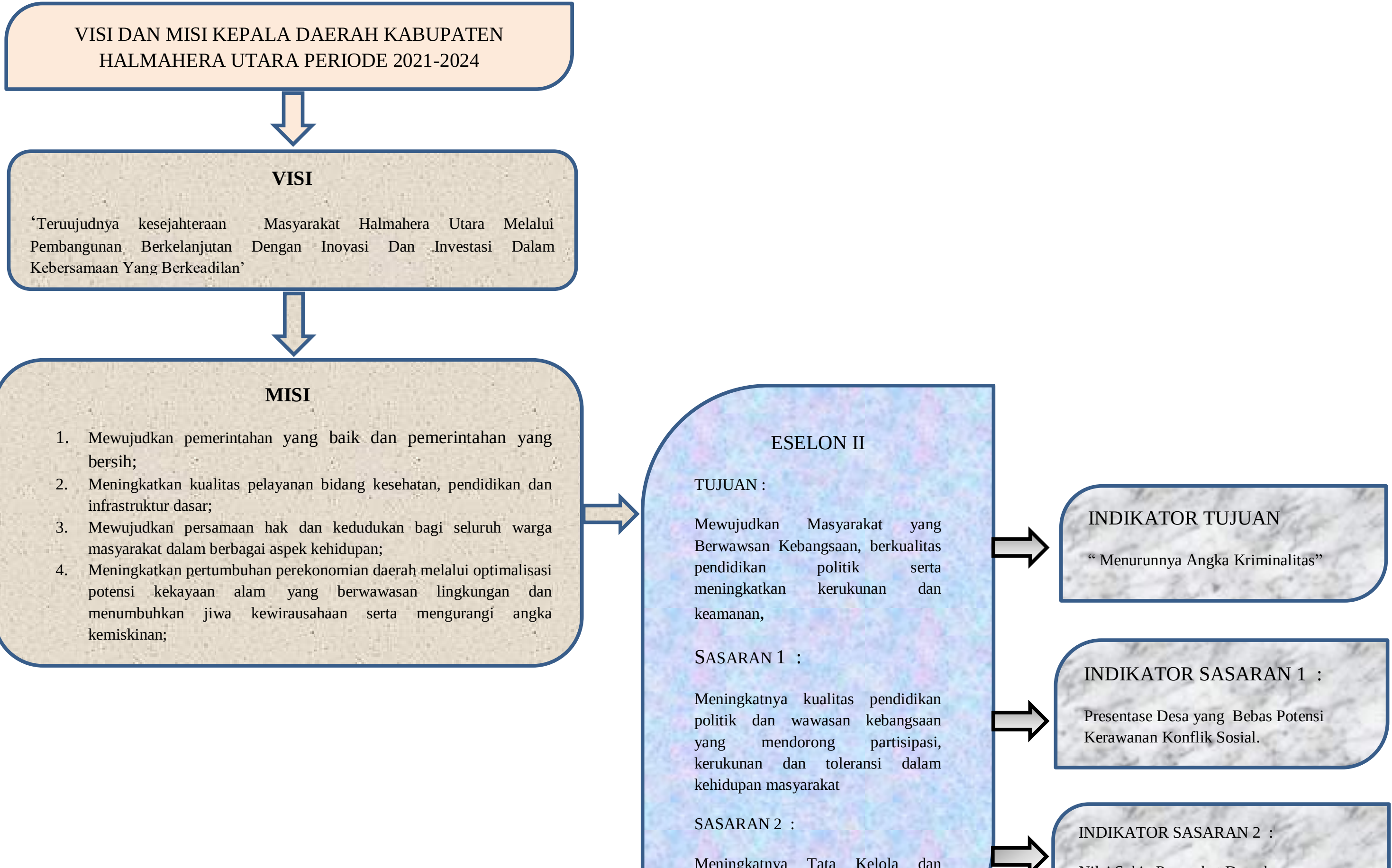


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
POHON KINERJA (CASCADING)
TAHUN 2022



ESELON III

PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Prog :
Meningkatnya Capaian Target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan.
Sasaran Prog :
Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.
Sasaran Prog :
Terlaksananya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Sasaran Prog :
Terlaksananya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
Sasaran Prog :
Terlaksana Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

INDIKATOR PROGRAM

1. Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah
2. Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
3. Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
4. Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5. Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
6. Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik social.

KEGIATAN (Kesekretariatan)

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan :
Jumlah Dokumen Perencanaan .
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran kgtn : *Terlaksananya Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Serta Pelaporan Keuangan Berkala Badan Kesbangpol*
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kgtn :
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Badan Kesbangpol
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran Kgtn :
Terlaksananya Administrasi Umum Badan kesbangpol
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kgtn :
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kgtn : *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.*

KEGIATAN BIDANG (Pembangunan)

7. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
Sasaran Kgtn :
Terlaksananya Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila Dan karakter Bangsa.
8. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik
Sasaran kgtn :
Terlaksananya Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik.
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

ESELON IV

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.
2. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.
3. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.
4. Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.
5. Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.
6. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.
8. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	8. Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan.	8.
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9.
10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.	12.
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13.
14. Fasilitasi Kunjungan Tamu	14. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.
17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17.
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18.
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	19. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.	19.
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak.	20.

SUB KEGIATAN

- 21. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 22. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 23. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 24. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 25. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 26. 'Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
- 27. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
- 28. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

INDIKATOR SUB KEGIATAN

- 21. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 22. Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.
- 23. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 24. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 25. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 26. Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun.
- 27. Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun.
- 28. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

- 21. T
- 22. T
- 23. T
- 24. T
- 25. T
- 26. T
- 27. T
- 28. T
- 29. T
- 30. T
- 31. T
- 32. T
- 33. T
- 34. T
- 35. T
- 36. T

SUB KEGIATAN

31. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
32. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
33. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
34. Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.
35. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah.
36. Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah
37. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
38. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
39. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan

INDIKATOR SUB KEGIATAN

31. Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun.
32. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
33. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
34. Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.
35. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah.
36. Jumlah Dokumen program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
37. Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
38. Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
39. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah

